

DAMPAK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BAGI MASYARAKAT KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA KECAMATAN TOMOHON BARAT

Johanis Yani Turambi

Florence D.J. Lengkong

Novva N. Plangiten

Johan14jan@gmail.com

ABSTRACT

This research is a descriptive research with a qualitative approach, the data collection technique of this research is using the observation method, namely, direct observation of the research location, as well as conducting interviews and documentation. As for the aim of the researchers is to describe how the impact of tourism development policies on the people in the North Woloan Satu village. Based on the results of research on the impact of existing tourism development policies in the Woloan Satu Utara sub-district, that tourism development policies have a good impact on the community, where through these policies the community can improve the economy, can open jobs for people around tourism areas.

Keywords: Policy, Development, Tourism

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang hampir seluruh daerahnya mempunyai daya tarik wisata, yaitu melalui keindahan alam, flora, fauna, dan peninggalan sejarah yang dimilikinya. Pengembangan pariwisata akan memberikan banyak pemasukan pada daerah yang sadar akan potensinya terhadap sector wisata. Dunia pariwisata melibatkan berbagai komponen yakni, pemerintah, pengusaha (kecil, menengah, besar), industri, pengrajin, seniman, budayawan, masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia istilah pariwisata baru dimulai pada awal tahun 1960-an. Istilah pariwisata diperoleh dari budayawan intelektual atas permintaan Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku ketua DTI (Dewan Tourisme Indonesia) pada tahun 1960. Secara terpisah dua orang budayawan, yaitu Moh. Yamin dan Prijono memberi istilah pariwisata untuk

mengganti istilah tourism atau travel, yang konotasinya dapat terkait dengan selera rasa pleasure, adventure dan sejenisnya. Istilah pariwisata terlahir dari bahasa sansekerta yaitu pari yang berarti penuh, lengkap, berkeliling, wis (man) yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas atau yang artinya pergi terus menerus, mengembara.

Tujuan utama kebijakan pengembangan destinasi pariwisata adalah peningkatan pendapatan devisa pariwisata Indonesia dan pengeluaran rata-rata wisman selama di Indonesia. Kebijakan ini diimplementasikan melalui penetapan kawasan ekonomi khusus pariwisata, partisipasi even investasi pariwisata, peningkatan kapasitas industry pariwisata, dan lain-lain.

Pengembangan industry pariwisata sendiri mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar objek wisata, karena dapat bertindak

sebagai sector unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah terutama bagi daerah yang mempunyai tempat pariwisata. Suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dapat dipandang sebagai konsumen sementara. Jika wisatawan yang datang ke destinasi tersebut sangat banyak mengeluarkan sebegitu banyak uang untuk membeli berbagai keperluan selama liburan, taidak dapat dibantah hal itu dapat berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

Namun dalam hal pengelolaan beberapa objek wisata di Kelurahan Woloan 1 Utara, Kecamatan Tomohon Barat masih ada kurangnya perhatian dalam pengelolaan potensi-potensi yang ada sehinggah ini yang menjadi kelemahan dan ancaman yang serius bagi pariwisata kecamatan Tomohon Barat dimana pihak asing yang mulai masuk dan mulai mengambil ahli sumber daya alam dan mempengaruhi pengelolaan pariwisata sehinggah masyarakat local tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi wisatanya sendiri ditambah kebijakan dan aturan yang lebih memihak kepada pengelola asing yang di nilai lebih kompeten dalam mengolah pariwisata. Serta kurangnya promosi tentang pariwisata yang ada di Kelurahan Woloan 1 Utara, kecamatan Tomohon Barat.

Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai dampak kebijakan pengembangan pariwisata di Kecamatan Tomohon Barat, untuk itu peneliti mengangka tjudul "Dampak Kebijakan Pengembangan Pariwisata bagi Masyarakat Kelurahan Woloan 1 Utara, Kecamatan Tomohon Barat".

TINJAUAN PUSTAKA

Dampak dari suatu kebijakan public mempunyai beberapa dimensi dan semuanya

harus diperhitungkan dalam mengevaluasi atau menilai dampak kebijakan. Dimensi-dimensi dampak kebijakan public menurut James Anderson dalam Islamy (2006) dan Winarno (2016) mencakup lima dimensi seperti diuraikan/dijelaskan sebagai berikut :

1. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) atau yang tidak diharapkan (*unintended consequences*), baik pada problemnya maupun pada masyarakat. Dengan demikian harus ditentukan lebih dahulu sasaran atau kebijakan/program itu terutama di tujukan untuk siapa, misalnya apakah pada masyarakat miskin, pengusaha ekonomi lemah, petani, guru dan sebagainya. Bila kebijakan yang memerangi kemiskinan, maka sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin dan dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan mereka. Tetapi pula mungkin timbul dampaknya yang tidak diharapkan, yaitu sebagian anggota masyarakat enggan berusaha keras memperoleh lapangan pekerjaan karena lebih senang menunggu subsidi dari pemerintah dengan adanya kebijakan/program anti kemiskinan tersebut.
2. Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luaratau yang bukan sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut. Dampak kebijakan ini biasa dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah atau limbah kebijakan (*externalities or spillover effects*). Dampak kebijakan pada keadaan atau kelompok di luar sasaran/tujuan kebijakan (eksternalitas) dapat yang positif atau juga yang negatif. Contoh, percobaa- percobaan senjata nuklir di atmosfir akan membantu pengembangan persenjataan, tetapi sekaligus juga akan menimbulkan bahaya pada penduduk

dunia pada waktu sekarang dan masa yang akan datang.

Contoh dampak positifnya misalnya tentang kebijakan penurunan tariff ekspor untuk meningkatkan penjualan di luar negeri, maka dampak positifnya adalah para konsumen akan memperoleh keuntungan dengan adanya harga-harga yang murah sebagai akibat bertambahnya import barang-barang tersebut.

3. Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. Pertanyaan yang di ajukan misalnya:apakah suatu kebijakan/program direncanakan untuk memperbaiki keadaan yang secara langsung untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang. Misalnya, dengan kenaikan harga BBM, apakah dimaksudkan hanya untuk mengatasi adanya kekurangan dana untuk pembangunan infrastruktur, ataukah untuk mempengaruhi atau mengubah pola-pola ekonomi masyarakat di masa-masa yang akan datang. Juga kebijakan tentang lokalisasi pelacuran, apakah akan mempunyai dampak hilangnya pelacur-pelacur gelap/liar ataukah pada jangka panjang suatu daerah akan bebas dari adanya kegiatan pelacuran.
4. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct costs*) yang dikeluarkan untuk membiayai kebijakan/program tersebut. Menghitung biaya untuk setiap kebijakan/program ekonomi pemerintah (*economis costs*) relative lebih mudah dibandingkan dengan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (*socialcosts*). Menghitung biaya pembangunan lokalisasi PSK jauh lebih mudah dibandingkan dengan menghitung dampak-dampak sosial dari adanya lokalisasi tersebut.

5. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Sering kali biaya seperti ini jarang dinilai karena sulitnya hal tersebut diidentifikasi/diukur; misalnya, begitu sulitnya mengukur ketidak enakan, keresahan sosial dan sebagainya sebagai akibat adanya kebijakan di bidang pengembangan pariwisata

Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arahan, tujuan pengembangan/ promosi, serta keputusan individu dan kelompok yang secara langsung mempengaruhi pembangunan pariwisata serta kegiatan jangka panjang dan aktivitas sehari-hari yang berlangsung di tempat tujuan.

Edgell et al. (2008), di mana kebijakan pariwisata berfokus pada masalah yang dihadapinya dan etis untuk secara efektif menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan perencanaan, pengembangan, produk,layanan, pemasaran, dan tujuan, Ini menunjukkan bahwa itu adalah kerangka kerja.

Menurut (Nyoman S Pendit, 2002: 1) Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam. Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisata dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkokuh jati diri dan kesatuan bangsa, memperlerat persahabatan antar bangsa.

Edwin B. Flippo mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: "Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh", sedangkan latihan di definisikan sebagai berikut: "Latihan adalah merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu".

Masyarakat merupakan sekelompok orang dalam sebuah system semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Menurut M.J. Herskovits, Masyarakat adalah kelompok individu yang dikoordinasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.

Penelitian Terdahulu

1. Arfan Takaliuang • Martha Ogotan • Novva Plangiten, Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Talaud (Sumber Jurnal Administrasi UNSRAT • 2016). Hasil penelitian dari penelitian ini adalah pertama, strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Talaud dalam membangun dan mengembangkan potensi-potensi wisata secara umum belum optimal, dikarenakan keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, juga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengembangkan sector pariwisata, dan kurangnya partisipasi generasi muda

melestarikan kebudayaan daerah. Kedua, peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam membangun sector pariwisata lebih dominan sebagai fasilitator dalam bentuk fisik.

2. Feki Lahamadi • Martha Ogotan • Very Londa • Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara) • (sumber Jurnal Administrasi Publik UNSRAT • 2016).

Hasil penelitian adalah dalam kaitannya dengan epektifitas kebijakan pengembang potensi pariwisata, variable yang diteliti dikaitkan dengan komponen-komponen kebijakan yang relevan. Komponen-komponen yang relevan dengan tindakan-tindakan (kebijakan) yang dilakukan oleh Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Tolitoli ialah mencakup komponen-komponen peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur pelaksana kebijakan; peningkatan kualitas pelayanan, terutama pelayanan perizinan usaha/industry kepariwisataan; peningkatan pemasaran dan promosi wisata Sosialisasi dan penyuluhan sadar wisata; pemanfaatan teknologi informasi; dan pembenahan manajemen kepriwisataan. Keberhasilan pengembangan daerah Kabupaten Tolitoli turut ditentukan atau dikontribusi oleh factor kebijakan pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

3. Kevin Hizkia Wongkar • Jantje Mandey • Jericho Denga Pombengi • Evaluasi Dampak Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (suatu Studi di Kecamatan Sario Kota Manado) • (sumber Jurnal Administrasi Publik UNSRAT • 2017) Hasil penelitian sebagai berikut; Kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan dalam bentuk implementasi program-program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kecamatan Sario Kota Manado, berada pada

kategori “tinggi”. Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Sario pasca implementasi PNPM Mandiri Perkotaan, punya kecenderungan lebih baik dibanding sebelum implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan berdampak positif dan signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Sario Kota Manado. Naik-turunnya kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Sario dapat dijelaskan melalui variasi keberhasilan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya di Kecamatan Sario Kota Manado. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tentang menganalisis dampak kebijakan bagi masyarakat.

4. Nowzellita Makahinda • Florence Daicy Lengkong • Deysi Livi Tampongangoy • Peranan Dinas Pariwisata dalam Pembangunan Industri Pariwisata Kota Bitung • (sumber Jurnal Administrasi Publik UNSRAT • 2015). Hasil penelitian ini adalah peran pemerintah atau dinas pariwisata berawal dari peranan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan, fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan pariwisata, dan pembuatan penegakan peraturan. Dan untuk menarik kunjungan wisatawan dan para investor yang bergerak dibidang pariwisata. Peran dinas pariwisata sangat berpengaruh atas pembangunan industry pariwisata Kota Bitung. Oleh karenanya tugas pokok dan fungsi melekat di Dinas Pariwisata, peran Dinas Pariwisata sangat penting karena memberikan rekomendasi dan masukan untuk pengawasan pembangunan industry pariwisata. Peran Dinas Pariwisata sampai sejauh ini belum terlibat terlalu jauh karena pengurusannya hanya bersifat satu pintu diperijinan. Dinas Pariwisata hanya memiliki wewenang untuk

mengatasi / mengevaluasi industry pariwisata yang telah ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan Dampak Kebijakan Pengembangan Pariwisata bagi Masyarakat Kelurahan Woloan Satu Utara, Kecamatan Tomohon Barat. Informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terikat secara penuh dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Kelurahan Woloan Satu Utara, Kecamatan Tomohon Barat yaitu:

1. Lurah Kelurahan Woloan 1 Utara: 1 orang
2. Pemilik tempat Wisata: 1 orang

Masyarakat Kelurahan Woloan 1 utara yang ada di Kawasan Pariwisata: 2 orang

Adapun Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk menjangkau data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara akan dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) maupun wawancara bebas bersamaan dengan observasi. Instrumen yang akan digunakan dalam wawancara ini adalah tipe *tape recorder*, yang dilengkapi dengan catatan-catatan kecil peneliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pembahasan masalah.

2. Observasi/Pengamatan

Teknik ini digunakan untuk merekam data-data primer yang berupa peristiwa atau situasi sosial tertentu pada lokasi penelitian, yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun instrument yang digunakan adalah catatan-catatan lapangan yaitu melakukan penelitian

dan pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009, tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Sementara itu wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang sedang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara, dan wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.

Pemerintah kota Tomohon melalui surat keputusan nomor 60 tahun 2020 tanggal 3 maret 20201, tentang mengembangkan dan mengelola serta menyusun destinasi wisata, peningkatan daya saing usaha pariwisata dan meningkatkan kebijakan destinasi pariwisata berkelas dunia serta meningkatkan perjalanan wisatawan. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada di kota Tomohon termasuk pariwisata yang ada di kelurahan woloan satu utara ini, masyarakat secara langsung dan tidak langsung sudah merasakan dampak positif dari kebijakan pengembangan pariwisata ini, pemerintah dan masyarakat, serta pengusaha tempat wisata bersama-sama saling membantu dalam pengembangan pariwisata.

Dampak pada masalah-masalah public pada dasarnya adalah untuk melihat seberapa berdampak kebijakan pengembangan pariwisata pada masalah-masalah public seperti, pengangguran, perekonomian yang rendah, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat kelurahan woloan satu utara, seperti mengurangi tingkat pengangguran, membuka lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan APBD

Dampak kebijakan pada keadaan dan kelompok-kelompok di luar tujuan atau sasaran kebijakan, Dampak kebijakan ini biasa dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah atau limbah kebijakan (*externalities or spillover effects*), ketika para wisatawan datang di tempat-tempat wisata yang ada di kelurahan Woloan Satu Utara dan merasa bahwa tempat wisata yang ada baik budaya maupun alam yang ada sangat bagus maka secara tidak langsung itu sudah menjadi hal yang baik bagi masyarakat Woloan Satu Utara, dikarenakan daerah tersebut sudah dapat di kenal masyarakat luas, dan juga ketika wisatawan membeli

produk rumah adat woloan maka itu merupakan salah satu bentuk mempromosikan daerah wisata ini dan bisa dikenal oleh masyarakat luas, disamping masyarakat dan pemerintah Woloan Satu Utara juga mempromosikan tentang tempat-tempat wisata yang ada.

Dampak pada masa sekarang dan yang akan datang, berkaitan erat dengan keberlangsungannya kebijakan ini apakah akan membawa dampak yang diharap oleh pemerintah, seperti meningkatnya perekonomian masyarakat, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, begitu juga dengan kelurahan woloan satu utara bisa di kenal pada masyarakat luar sebagai salah satu daerah wisata budaya dan alam. Pemerintah juga kedepannya berharap bisa lebih mengembangkan potensi wisata alam yang ada di kelurahan woloan satu utara dengan membuka atau menambah tempat-tempat wisata baru, karena masih banyak lokasi yang berpotensi dijadikan sebagai tempat wisata yang baru, dengan adanya tempat-tempat wisata yang baru maka secara perlahan kelurahan woloan satu utara bisa lebih menonjolkan potensi sebagai daerah wisata,

Biaya yang dipakai pada program kebijakan public, biaya yang dipakai pada kebijakanberupabiayalangsung yang mengarah pada pembuatan serta perbaikan fasilita stranspotrasi berupa, pembangunan akses jalan menuju ke lokasi pariwisata, serta memperbaiki jalanan yang berlubang bahkan rusak yang menuju ketempat wisata, serta sosialisasi bagi masyarakat agar bisa lebih menjaga kebaikan tempat pariwisata.

Biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh kelompok atau pemilik tempat wisata, yaitu biaya untuk perawatan serta perbaikan tempat wisata yang sudah membutuhkan perbaikan dan perawatan, biaya tidak langsung ini bisa diambil dari keuntungan tempat wisata tersebut, biaya

tidak langsung lebih besar dari biaya langsung dikarenakan, biaya tidak langsung itu sendiri dikeluarkan secara bertahap dan serta berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan pengembangan pariwisata bagi masyarakat kelurahan woloan satu utara, kecamatan Tomohon Barat dilihat dari beberapa dimensi sebagai berikut:

Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik Dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisata di kelurahan woloan satu utara, dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat, peningkatan infrastruktur seperti akses jalan sudah lebih baik. Dampak kebijakan pada keadaan dan kelompok-kelompok di luar tujuan atau sasaran kebijakan, wisatawan bisa menikmati pemandangan alam bahkan wisata budaya dengan dengan perasaan senang, wisatawan juga bisa membeli produk dari masyarakat,

Dampak pada masa sekarang dan masa yang akan datang, dapat meningkatnya pendapatan asli daerah, terjaganya kebudayaan daerah, Lebih terbukanya kesempatan masyarakat untuk membangun tempat-tempat wisata yang baru, kerena masih banyak lahan yang berpotensi sebagai tempat wisata.

Biaya langsung yang dipakai dalam kebijakan pengembangan, Biaya langsung yang dikeluarkan pemerintah untuk kebijakan pengembangan pariwisata berupa dibuatnya akses transportasi, berupa jalan untuk menuju tempat wisata, Perbaikan infrastruktur dalam hal ini adalah jalan menuju lokasi wisata, seperti memperbaiki jalan yang berlobang, Biaya tidak langsung yang ditanggung oleh pengelola tempa

twisata, Perawatan bagi tempat wisata, Perbaikan tempat-tempat untu kwisatawan berfoto, Untuk mempromosikan tempat wisata

Saran

Dampak kebijakan pengembangan pariwisata di kelurahan woloan satu utara mungkin saat ini sudah baik, tapi agar lebih baik lagi dan kelurahan woloan satu utara bisa dikatakan sebagai desa wisata adalah dengan bekerja samanya pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga lingkungan tempat wisata agar bisa bersih, terawatt, dan agar masyarakat bisa membantu pemerintah untuk mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Edgell Sr, David L., Allen, Maria Del Mastro, Smith, Ginger, & Swanson, Jason R. (2008). *Tourism Policy and Planning (Yesterday, Today and Tomorrow)*. UK: Elsevier..
- Edwin B. Flippo. 2002. *Konsep Pengembangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Goeldner, C. R. Ritchie, J. R. Brent. (2009). *Tourism Principles Practices Philophies. 7th edition*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Herskovits, M. & Malinowski, B. (1940). dalam *Malinowski, Herskovits, and the controversy over economics in anthropology* oleh Cook, S. & Young, M. W. (2016). *History of Political Economy*, 48, pp.4.
- Islamy, I.M., 2006, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Rineka Cipta
- Nyoman S Pendit, 2002 *Ilmu Pariwisata*. Bandung: Sinar Baru Argesindo.
- Winarno,B. 2016, *Kebijakan Publik Era Globalisasi :Teori, Proses dan Studi Komparatif*, Yogyakarta, CAPS.
- Sumber lain:
- Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Surat Keputusan nomor 60 tahun 2020 tanggal 3 maret 20201
- Jurnal Administrasi UNSRAT:
- Arfan Takaliuang • Martha Ogotan • Novva Plangiten, Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Talaud (Sumber Jurnal Administrasi UNSRAT • 2016).
- Feki Lahamadi • Martha Ogotan • Very Londa • Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara) • (sumber Jurnal Administrasi Publik UNSRAT • 2016)
- Kevin Hizkia Wongkar • Jantje Mandey • Jericho Denga Pombengi • Evaluasi Dampak Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (suatu Studi di Kecamatan Sario Kota Manado) • (sumber Jurnal Administrasi Publik UNSRAT • 2017)
- Nowzellita Makahinda • Florence Daicy Lengkong • Deysi Livi Tampongangoy • Peranan Dinas Pariwisata dalam Pembangunan Industri Pariwisata Kota Bitung • (sumber Jurnal Administrasi Publik UNSRAT • 2015)